

**IMPLIKASI KEBERLAKUAN TERHADAP SURAT EDARAN  
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR: 590/0002669 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA UNTUK PELAKSANAAN  
PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI DESA BAGOR  
KECAMATAN MIRI, SRAGEN.**



**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh**

**Afandi Ahmad Ramadhani**

**NIM. E0013021**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

**IMPLIKASI KEBERLAKUAN TERHADAP SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA  
TENGAH NOMOR: 590/0002669 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA  
UNTUK PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI DESA  
BAGOR KECAMATAN MIRI, SRAGEN.**

Oleh:

**AFANDI AHMAD RAMADHANI**

**NIM. E0013021**

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulis Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dosen Pembimbing


Surakarta, 2 Oktober 2017

Pembimbing I



**SURANTO S.H.,MH**  
NIP. 195608121986011001

Pembimbing II



**JADMIKO ANOM HUSODO, S.H.,M.H**  
NIP. 197004241995121001

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Implikasi Keberlakuan Terhadap Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor:  
590/0002669 Tentang Pembentukan Peraturan Desa Untuk Pelaksanaan Proyek  
Operasi Nasional Agraria Di Desa Bagor Kecamatan Miri, Sragen.**

**Disusun oleh :****Afandi Ahmad Ramadhani****NIM. E0013021**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas Sebelas Maret Surakarta****Pada Hari / Tanggal : Senin 23 Oktober 2017****DEWAN PENGUJI**

1. Nama : Suranto S.H.,MH  
NIP : NIP. 195608121986011001  
Ketua

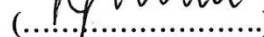


2. Nama : Jadmiko Anom Husodo,  
S.H.,M.H  
NIP : 197004241995121001



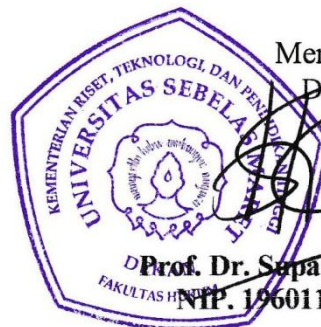
Sekretaris

3. Nama : Dr. Agus Riwanto S.H.,  
S.Ag., M.Ag



NIP : 197308042000121001

Anggota



Mengetahui  
Dekan

**Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum**  
NIP. 196011071986011001

**SURAT PERNYATAAN**

**Nama : Afandi Ahmad Ramadhani**  
**NIM : E0013021**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :  
**IMPLIKASI KEBERLAKUAN TERHADAP SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR: 590/0002669 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA UNTUK PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI DESA BAGOR KECAMATAN MIRI, SRAGEN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 29 Maret 2017  
Yang membuat pernyataan,



Afandi Ahmad Ramadhani  
E0013021

## MOTTO

“Jangan menunda sesuatu hal karena menentukan masa depanmu”

“Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira, Man Sara Ala Darbi Washala”

“Bila kamu tidak capek, berarti kamu tidak sedang memperjuangkan sesuatu  
didalam hidupmu” - **Ayescha**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada:**

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rizki-Nya.
2. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Daryono dan Ibu Alus Fajriyah atas segala doa, dukungan, dan kasih sayangnya dalam setiap hari-hariku.
3. Kakak dan Adik dan keponakan penulis
4. Teman – teman HMI Komisariat Fakultas Hukum yang memberi ilmu dan pengalaman selama ikut berorganisasi
5. Teman- teman KKN Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring Klaten yang mendoakan yang terbaik
6. Teman – teman Magang yang memberikan semangat ke penulis
7. Terimakasih kepada temanku Muhammad Sidik yang selalu memotivasi penulis sehingga penulis semangat dalam membuat skripsi
8. Terimakasih kepada Andhika Handi yang membantu penulis
9. Terimakasih kepada Teguh Wisnu Wardhana yang selalu bisa menemani penulis saat penelitian.
10. Teman-teman penulis lain yang selalu memberikan semangat dan motivasi tanpa henti.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah member bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan.

## ABSTRAK

**Afandi Ahmad Ramadhani, E0013021 IMPLIKASI KEBERLAKUAN TERHADAP SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR: 590/0002669 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA UNTUK PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI DESA BAGOR KECAMATAN MIRI, SRAGEN. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji Implikasi Keberlakuan Terhadap Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/0002669 Tentang Pembentukan Peraturan Desa Untuk Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria Di Desa Bagor Kecamatan Miri, Sragen..Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dan implikasi yuridis peraturan desa Bagor Kecamatan Miri Kabupaten Sragen yang dibuat oleh Pemerintahan Desa terkait dengan adanya Proyek Operasi Nasional Agraria yang masih dipermasalahkan landasan hukumnya.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik kepustakaan yang terkait baik dari media cetak maupun media internet dan teknik selanjutnya adalah teknik lapangan yang menggunakan metode wawancara. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilaksanakan melalui pola berpikir induksi.

Pembahasan mengenai terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/0002669 tentang Pembentukan Peraturan Desa Untuk Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria yang mewajibkan setiap kepala desa untuk membuat peraturan desa dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan sertipikat tanah tanah perlu adanya payung hukum yang jelas untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dari Kantor Pertanahan terpadu yang mencakup semua fungsi keagrariaan. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah payung hukum yang dijadikan landasan Perdes serta standarisasi biaya atau rambu-rambu nominal biayanya sehingga tidak terkesan masing-masing desa seenaknya menentukan tariff. Pembentukan peraturan desa yang diharapkan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan asas good government.

**Kata Kunci:** Surat Edaran, Desa, Proyek Operasi Nasional Agraria, Peraturan Desa

**ABSTRACT**

**Afandi Ahmad Ramadhani, E0013021, IMPLICATIONS OF ENFORCEABILITY AGAINST CENTRAL JAVA GOVERNOR'S CIRCULAR LETTER NUMBER: 590 0002669 ON THE ESTABLISHMENT OF RULES FOR VILLAGE PROJECTS IN AGRARIAN NATIONAL OPERATIONS IN THE VILLAGE OF THE SUBDISTRICT BAGOR MIRI, SRAGEN. Faculty of Law, Sebelas Maret University.**

The research of this law aims to examine the implications of Enforceability Against Central Java Governor's circular letter number: 590/0002669 on the establishment of Rules For Village projects in Agrarian national operations in the village of the subdistrict Bagor Miri, Sragen.. This research was carried out by the author to know the extent to which the juridical consequences of regulatory authority and the village of the subdistrict Bagor Miri Sragen district created by the Government of the village is related to the existence of the National Agrarian Operation Projects that still question its legal foundation.

Research use of prescriptive empirical law research. Research approach use of approach of legislation, case approach and conceptual approach. The source material consists of primary law material and secondary law material. Technique collection of law materials used are techniques related to literature from printed media and internet media also technique of any field in which technician used interview method. Analytical materials law in the research undertaken through a pattern of thinking syllogism deduction.

A discussion of the publication of the circular letter Governor of Central Java, Number : 590/0002669 on the establishment of Rules For Village projects in Agrarian national operations which require every village chief to make regulation of the village in order to meet the wishes of the community in obtaining the certificate of land land need for clear legal umbrella for the improvement of service to the community of Integrated Land Office which includes all the functionality of keagrariaan. Then the other thing to consider is the Foundation of the legal foundation umbrella Perdes and standardization of cost or nominal cost signs so not impressed each village lightly define the set fee.

**Keywords:** Circulars, Village, National Agrarian Operations Project, Regulations Of The Village



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala petunjuk, rahmat dan rejeki yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini berjudul **“IMPLIKASI KEBERLAKUAN TERHADAP SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR: 590/0002669 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA UNTUK PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI DESA BAGOR KECAMATAN MIRI, SRAGEN.”**. Penulisan hukum (skripsi) ini membahas serta mengkaji tentang bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan untuk Pelaksanaan Proyek Nasional Agrarian Di Desa Bagor Kecamatan Miri Kabupaten Sragen.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Atas perhatian yang besar selama penulisan hukum ini, maka perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Suranto, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta sekaligus Pembimbing I Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini;
3. Jadmiko Anom Husodo, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini;
4. Agus Rianto, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat yang sangat berarti dalam proses belajar mengajar penulis selama menempuh kuliah;

5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu dalam proses menuju penyusunan penulisan hukum ini;
6. Keluargaku yang selalu mendukung dan mendoakanku, Bapak, Ibu, Dek serta Kakak dan Adik yang membantu penulis dalam berproses dan mengajarkan banyak hal dalam hidup;
7. Sahabat Kuliah Kerja Nyata Desa Ketitang dan Sahabat Magang Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen;
8. Rekanku Muhammad Sidik yang selalu membantuku disaat penulis kesusahan dan selalu memberi nasihat kepadaku.
9. Rekanku Teguh Wisnu Wardana yang selalu aku mintai barengan penulis saat penelitian maupun magang di Pengadilan Negeri Sragen.
10. Rekan-rekanku di HMI Komisariat Fakultas Hukum UNS yang mengajarkanku ilmu yang berharga.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta,30 Juli 2017

Penulis

Afandi Ahmad Ramadhani

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Mengenai Surat Edaran.....	13
2. Tinjauan Mengenai Kedudukan Surat Edaran Tentang Pembentukan PRONA .....	14
3. Tinjauan Mengenai PRONA .....	19
4. Tinjauan Mengenai Peraturan Desa .....	20
B. Kerangka Pemikiran.....	23

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	25
1. Kewenangan kepala desa Bagor dalam membuat peraturan desa tentang Pelaksanaan Proyek Nasional Agraria berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/0002669	
2. Implikasi yuridis yang timbul dari berlakunya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/0002669 Tentang Pembentukan Peraturan Desa Untuk Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria.....	48
B. Pembahasan.....	56
1. Kewenangan kepala desa Bagor dalam membuat peraturan desa tentang Pelaksanaan Proyek Nasional Agraria berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/0002669 .....	56
2. Implikasi yuridis yang timbul dari berlakunya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/0002669 Tentang Pembentukan Peraturan Desa Untuk Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria.....	65

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I	
Daftar Nama Anggota Panitia Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria di Desa Bagor Kecamatan Miri Kabupaten Sragen .....	46
Tabel II	
Daftar Hadir Sosialisasi PRONA dari BPN Tahun 2017 .....	49



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I Kerangka Pemikiran.....	23

